

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TOMOHON

Dwi Raharjo¹, Wilson Bogar², Recky H. E. Sendouw³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: dwiraharjo25@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di BPS Kota Tomohon. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPS Kota Tomohon dinilai cukup tetapi perlu penguatan. Dari lima komponen COSO, kegiatan pengendalian memiliki pelaksanaan terbaik karena prosedur verifikasi berlapis dan pembagian tugas yang jelas. Informasi dan komunikasi menjadi komponen yang membutuhkan perhatian terbesar karena masih terjadi kesenjangan data antara unit teknis dan keuangan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 97,13 pada tahun 2023 menjadi 93,20 pada tahun 2024. Lingkungan pengendalian telah menunjukkan komitmen pimpinan yang kuat, namun internalisasi nilai pengendalian pada staf operasional belum merata. Penilaian risiko masih bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan mendadak dari pusat. Kegiatan pemantauan telah dilakukan secara rutin namun masih bersifat reaktif karena belum adanya sistem peringatan dini berbasis data.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengelolaan Keuangan, COSO, BPS Kota Tomohon

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of five elements of the Government Internal Control System (SPIP), namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and internal control monitoring in financial management at the Central Statistics Agency (BPS) of Tomohon City. The study uses a post-positivist approach with qualitative methods. The research location is BPS of Tomohon City. Primary data were obtained through in-depth interviews with four key informants consisting of the Budget User Authorization (KPA), Commitment Making Officer (PPK), Payment Order Signing Officer (PPSPM), and Expenditure Treasurer. Secondary data were obtained from documents, journals, books, and laws and regulations. Data validation techniques used source triangulation, technical triangulation, and member checking. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The

results of the study indicate that in general the implementation of the internal control system at BPS of Tomohon City is considered adequate but needs strengthening. Of the five COSO components, control activities have the best implementation due to layered verification procedures and clear division of tasks. Information and communication are the components requiring the greatest attention, as data gaps persist between technical and financial units, directly contributing to the decline in the Budget Execution Performance Indicator (IKPA) from 97.13 in 2023 to 93.20 in 2024. The control environment demonstrates strong leadership commitment, but internalization of control values among operational staff is uneven. Risk assessments remain reactive to sudden policy changes from the central government. Monitoring activities are conducted routinely but remain reactive due to the lack of a data-based early warning system.

Keywords: Government Internal Control System, Financial Management, COSO, Tomohon City Statistics Office

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan salah satu proses dalam siklus penganggaran yang sangat penting untuk diperhatikan, karena harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan kegiatan dan anggaran di Badan Pusat Statistik (BPS) telah tercantum diantaranya dalam dokumen Rencana Strategis BPS, RKA K/L, Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen perencanaan lainnya.

Alat ukur objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berfungsi untuk menentukan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran pada setiap Satuan Kerja (Satker), termasuk instansi seperti BPS Kota Tomohon. IKPA berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>).

Berdasarkan reformulasi terbaru, IKPA diukur melalui tiga aspek strategis yang mencakup berbagai indikator teknis, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang menilai sejauh mana Satker mampu merencanakan anggaran secara presisi agar tidak banyak melakukan perubahan di tengah jalan, Revisi DIPA yang menilai frekuensi revisi anggaran. Terlalu banyak revisi menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang, Deviasi Halaman III DIPA yang Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan yang disusun dengan realisasi senyatanya. Selanjutnya indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang berfokus pada disiplin Satker dalam menjalankan kegiatan dan ketepatan waktu dalam administrasi keuangan yang diukur melalui Penyerapan Anggaran yaitu untuk memastikan penyerapan sesuai target triwulanan (menghindari penumpukan belanja di akhir tahun), belanja Kontraktual yang mengukur ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak ke KPPN setelah kontrak ditandatangani, penyelesaian tagihan untuk mengukur Kecepatan Satker dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah timbulnya hak tagih (maksimal 17 hari kerja), pengelolaan UP dan TUP yang mengukur Ketertiban dalam mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan. Indikator terakhir yaitu Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Aspek ini melihat output nyata dari penggunaan anggaran tersebut berupa nilai capaian Output yang mengukur nilai keselarasan antara uang yang dikeluarkan dengan progres fisik atau output yang dihasilkan.

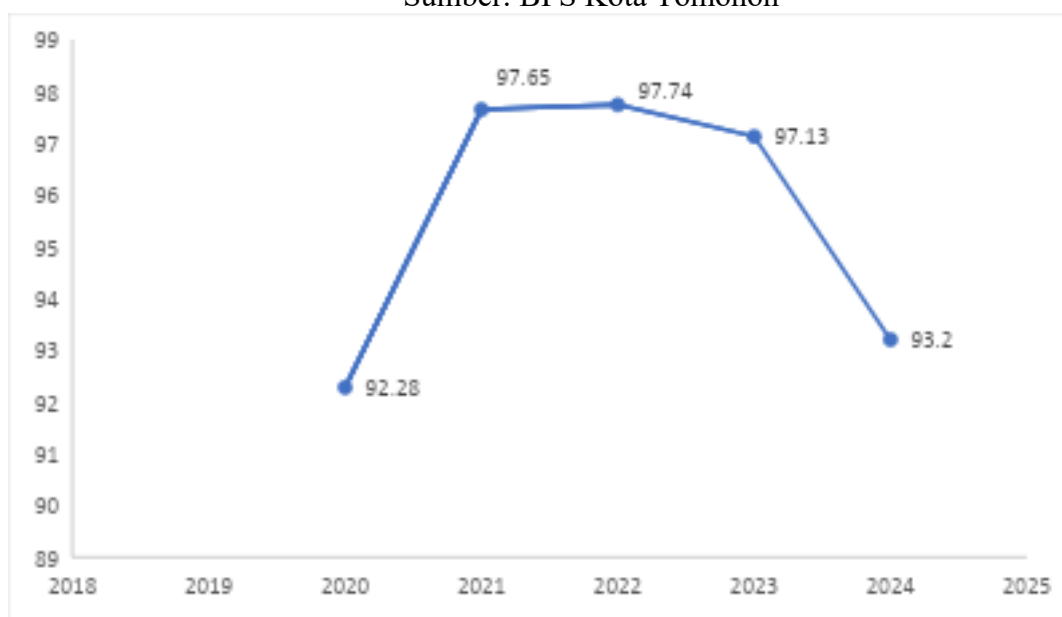
IKPA bukan sekadar angka di atas kertas, namun memiliki dampak nyata terhadap tata kelola cerminan Integritas dan Profesionalisme dimana Nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen Satker memiliki kontrol yang kuat terhadap proses bisnisnya. Identifikasi Kelemahan (*Early Warning*) mengindikasikan jika nilai pada indikator Penyelesaian Tagihan rendah, ini menjadi sinyal bagi pimpinan bahwa ada hambatan

birokrasi di bagian keuangan yang harus segera diperbaiki. Jika dikaitkan dengan opini BPK dimana jika temuan BPK terkait ketidaktertiban belanja atau pengendalian realisasi yang tidak memadai biasanya akan tercermin langsung pada skor IKPA yang rendah. Adapun nilai IKPA BPS Kota Tomohon disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai IKPA BPS Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nilai IKPA
1	2020	92,28
2	2021	97,65
3	2022	97,74
4	2023	97,13
5	2024	93,2

Sumber: BPS Kota Tomohon



Gambar 1. Nilai IKPA BPS Kota Tomohon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Tomohon

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan pada nilai IKPA BPS Kota Tomohon dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang tajam sebesar 97,74. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan nilai IKPA dari 92,28 menjadi 97,65. Kenaikan signifikan nilai IKPA pada tahun 2021 menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat untuk meningkatkan pengendalian anggaran selama pandemi. Sepanjang waktu ini, prosedur otorisasi dan verifikasi pembayaran berjalan cukup lancar. Karena kerjasama yang sangat baik antara Tim teknis BPS Kota Tomohon dan tim keuangan, sehingga sangat sedikit deviasi dari rencana pencairan dana. Nilai di atas 97 menunjukkan kategori "Sangat Baik", yang berarti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran mencapai level optimal

Pada Tahun 2023 nilai IKPA mengalami sedikit penurunan menjadi 97,13. Penurunan tipis ini bisa mengindikasikan munculnya risiko baru yang belum sepenuhnya termitigasi, seperti perubahan kebijakan teknis dari pusat atau dinamika lapangan dalam pelaksanaan survei yang mulai bergeser. Meskipun masih dalam kategori "Sangat Baik", penurunan ini menjadi sinyal awal bahwa sistem pemantauan terhadap kepatuhan jadwal tagihan perlu diperketat kembali.

Puncaknya pada tahun 2024 nilai IKPA BPS Kota Tomohon terjadi penurunan tajam ke angka 93,2. Penurunan sebesar 4 poin dalam satu tahun mengindikasikan adanya kendala serius dalam aspek pengendalian. Hal ini Sesuai dengan temuan BPK LKPP 2024 yang

dibahas sebelumnya yaitu disebabkan oleh kelemahan penganggaran yang mengakibatkan tingginya deviasi Halaman III DIPA, keterlambatan dalam penyelesaian tagihan atau pertanggungjawaban UP/TUP serta kurangnya sumber daya atau pemahaman terhadap metodologi pelaporan kinerja yang baru berdampak pada rendahnya akurasi data output

Berbagai masalah signifikan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kelemahan pengendalian internal ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2024. Salah satu temuan utama adalah bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disusun secara tidak memadai karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan teknik, yang meningkatkan kemungkinan terciptanya data yang tidak akurat dan tidak terpercaya. Selain itu, BPK menyoroti adanya strategi revisi anggaran yang melampaui batasan tahun anggaran saat ini, sehingga mengganggu tata kelola penyelesaian anggaran.

Terdapat temuan bahwa kekurangan kontrol pada perencanaan dan realisasi pengeluaran staf, yang memungkinkan pengeluaran sering kali melebihi batas maksimum DIPA. Terakhir, terdapat masalah dengan penyajian aset, seperti proses pertanggungjawaban yang berlarut-larut dan pengalihan inventaris ke publik atau pemerintah daerah, di mana karakteristik aset lancar tidak sesuai dengan klasifikasi biaya dibayar di muka. Akibatnya, saldo yang dicatat tidak mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan yang sebenarnya.

Terjadi kekurangan sistemik dalam pengendalian internal dan kepatuhan hukum yang ditemukan dalam Laporan Audit BPK atas LKPP Tahun 2024. Masalah utama meliputi proses pembuatan laporan kinerja, yang saat ini kurang baik karena keterbatasan sumber daya dan metodologi, sehingga membahayakan ketepatan dan keandalan data yang disediakan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengelolaan anggaran terkait prosedur revisi anggaran yang dapat menyebabkan kesalahan administrasi dan pengawasan yang tidak memadai terhadap realisasi belanja yang melebihi batas referensi. Terakhir, ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset lancar, terutama dalam cara penyajian biaya dibayar di muka dan keterlambatan pertanggungjawaban atas pemindahan publik inventaris. Ketidaksesuaian ini berdampak pada akurasi manfaat ekonomi masa depan yang dicatat dalam neraca pemerintah.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantuan pengendalian intern pengelolaan keuangan di Badan Pusat Statistik Kota Tomohon.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif yang bertujuan membandingkan dan menguji kebenaran absolut dari pengetahuan dengan realita yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di instansi vertikal pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon. Sumber data utama (data primer) diperoleh melalui wawancara mendalam kepada empat informan kunci yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen, jurnal, buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara. Pertama, observasi non-partisipan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan keuangan, prosedur harian penatausahaan keuangan, ketersediaan sarana pendukung seperti aplikasi SAKTI, serta interaksi dan kedisiplinan pegawai. Kedua, wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketiga, dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder administratif seperti struktur organisasi, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Keempat, studi pustaka melalui kajian literatur, buku, jurnal ilmiah, serta regulasi pemerintah seperti PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Teknik pengabsahan data menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara antar informan), triangulasi teknik (mengecek data dengan observasi dan studi dokumen), peningkatan ketekunan, serta member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data (pemilihan dan penyederhanaan data mentah disertai pemberian kode), penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan bagan alur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan sejak sebelum memasuki lapangan hingga akhir penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Pengendalian

Pada temuan utama diketahui bahwa Pimpinan BPS Kota Tomohon telah menunjukkan komitmen nyata melalui rapat evaluasi berkala, penetapan SOP, pakta integritas, dan program pelatihan. Namun jangkauan program kompetensi belum merata ke seluruh staf pendukung. Kekuatan pada lingkungan pengendalian yang telah dijalankan di BPS Kota Tomohon yaitu Komitmen pimpinan yang kuat, SOP terdokumentasi, pakta integritas, dan sertifikasi pejabat keuangan aktif berjalan. Adapun kelemahan pada komponen ini yaitu Program pelatihan masih terfokus pada pejabat utama; internalisasi nilai-nilai pengendalian pada staf operasional belum konsisten.

Penelitian oleh Leke dkk. (2022) menganalisis lingkungan pengendalian Inspektorat Kabupaten Nagekeo dalam melaksanakan SPIP dan menemukan bahwa komitmen pimpinan serta independensi APIP masih memerlukan penguatan signifikan. Sementara itu, Setiyaviani & Julian (2023) dalam evaluasinya terhadap KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan melaporkan bahwa lingkungan pengendalian tergolong baik dengan adanya kode etik dan struktur organisasi yang jelas, namun masih ditemukan celah dalam pemisahan fungsi dan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai integritas. Temuan di BPS Kota Tomohon memperkuat kedua penelitian tersebut, di mana komitmen pimpinan telah terbukti kuat namun internalisasi nilai pengendalian pada staf operasional masih belum merata, mengindikasikan bahwa lingkungan pengendalian yang efektif tidak cukup hanya dengan kebijakan tertulis tetapi memerlukan pembudayaan secara konsisten di seluruh level organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Radjak, Sendouw, & Siwij (2025, hlm. 2508) yang menyatakan bahwa koordinasi yang sinergis dan pembagian beban kerja yang proporsional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pimpinan dan staf operasional menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis untuk meningkatkan komponen lingkungan pengendalian pengelolaan keuangan di BPS Kota Tomohon yaitu memperluas program diklat ke seluruh staf keuangan pendukung; laksanakan sosialisasi kode etik secara berkala di seluruh unit fungsi.

2. Penilaian Risiko

Menggambarkan bahwa register risiko memang sudah disusun di awal tahun anggaran, namun mekanisme respons terhadap risiko yang bersifat dinamis terutama perubahan jadwal survei dan kebijakan mendadak dari pusat belum optimal dan cenderung reaktif. Di sisi positif, identifikasi risiko telah dilakukan secara terorganisir menggunakan daftar risiko, yang didukung oleh pemantauan portal regulasi secara rutin dan kolaborasi aktif dengan BPS Provinsi. Reaksi BPS Pusat yang tertunda terhadap perubahan kebijakan yang mendadak dan kurangnya mekanisme eskalasi risiko secara real-time merupakan

kelemahannya. Saran yang diberikan adalah memasukkan pemantauan risiko ke dalam agenda rapat tinjauan bulanan dan membuat sistem manajemen risiko yang lebih formal dengan prosedur eskalasi bertingkat.

Penelitian oleh Ariyanto et al. (2022) mengevaluasi penerapan komponen penilaian risiko dalam kerangka SPIP pada instansi vertikal pemerintah pusat dan menemukan bahwa mayoritas instansi belum melakukan penilaian risiko secara formal dan terstruktur dengan daftar risiko yang diperbarui secara berkala. Penelitian oleh Pujiastuti & Anwar (2022) mengembangkan model integrasi COSO dengan Fraud Pentagon Theory, menekankan bahwa penilaian risiko kecurangan di pemerintah daerah masih bersifat reaktif dan belum mempertimbangkan perubahan lingkungan secara dinamis. Hasil penelitian di BPS Kota Tomohon sejalan dengan temuan tersebut, dimana register risiko telah disusun di awal tahun namun mekanisme respons terhadap perubahan kebijakan mendadak dari pusat masih bersifat reaktif, menegaskan perlunya sistem manajemen risiko dengan prosedur eskalasi bertingkat.

3. Kegiatan Pengendalian

Mencatat bahwa pemantauan faktor dilakukan secara berkala dan bahwa pemisahan tanggung jawab antara KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara telah diterapkan dengan baik. Pemantauan faktor mingguan PPK, peringatan awal realisasi belanja oleh Bendahara, dan pembagian peran yang jelas merupakan keunggulan utamanya. Ketiadaan sistem peringatan otomatis untuk pembatasan tagihan atau penyimpangan dari Rencana Penarikan Dana (RPD) serta fakta bahwa proses manual masih mendominasi dalam proses pemantauan merupakan kelemahannya. Mekanisme peringatan batas tagihan pada aplikasi SAKTI sebaiknya diotomatisasi, dan dashboard terpadu untuk pemantauan realisasi harian perlu dibuat.

Penelitian oleh Rohmah & Sulistyowati (2022) mengungkapkan bahwa implementasi e-government secara signifikan meningkatkan efektivitas aktivitas pengendalian melalui otomatisasi otorisasi bertingkat dan audit trail yang komprehensif. Penelitian oleh Wulandari & Fachrurazi (2023) mengklasifikasikan aktivitas pengendalian ke dalam pengendalian preventif dan detektif, serta merekomendasikan keseimbangan kedua kategori untuk efektivitas pengendalian secara keseluruhan. BPS Kota Tomohon telah menerapkan pemisahan tugas dan prosedur verifikasi berlapis dengan baik, namun dominasi proses manual dalam pemantauan tagihan dan RPD menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi informasi masih belum maksimal, sehingga diperlukan otomatisasi sistem peringatan dini. Kantohe & Sumual (2023) menegaskan bahwa peran sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi sangat penting dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik. Dengan demikian, penguatan komitmen seluruh jajaran dalam mengoptimalkan sistem pengendalian internal menjadi faktor determinan keberhasilan kegiatan pengendalian."

4. Informasi dan Komunikasi

Menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SAKTI, OM-SPAN, dan BOS sudah berjalan dengan cukup baik. Kekuatannya terletak pada konsistensi penggunaan aplikasi sistem keuangan negara dan keterlibatan semua unit dalam rapat koordinasi penyusunan RPD. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara data survei keuangan dan teknis, sehingga memerlukan rekonsiliasi yang menyeluruh. Tidak adanya dasbor manajemen waktu nyata dan gap data yang ditutup secara tidak teratur antara realisasi keuangan dan fisik merupakan kelemahan tambahan. Disarankan untuk membuat platform dasbor berbasis web yang terintegrasi yang mempersatukan data keuangan dan teknis serta menstandarisasi format laporan pencapaian output untuk semua unit teknis.

Penelitian oleh Suhendra & Komarudin (2021) membuktikan bahwa kualitas sistem informasi manajemen pemerintah berkorelasi positif dengan kualitas pelaporan keuangan, di mana entitas dengan sistem informasi terintegrasi 2,7 kali lebih sering memperoleh opini

WTP. Penelitian oleh Kusuma & Handayani (2022) meneliti dampak integrasi SIPD terhadap pengendalian internal di 38 provinsi dan menemukan bahwa meskipun integrasi sistem meningkatkan efektivitas komunikasi, pengaruhnya terhadap penilaian risiko relatif lebih kecil karena faktor manusia dan budaya organisasi tidak dapat digantikan oleh teknologi. Kesenjangan data antara unit teknis survei dan unit keuangan di BPS Kota Tomohon mencerminkan belum optimalnya integrasi sistem, sehingga rekonsiliasi manual masih mendominasi dan berpotensi memperlambat deteksi masalah serta menurunkan akurasi laporan kinerja.

5. Kegiatan Pemantauan

Mencatat bahwa reviu IKPA bulanan dan rekonsiliasi kas dengan KPPN dilaksanakan secara konsisten, tindak lanjut temuan audit difasilitasi melalui aplikasi SPDER, dan evaluasi kinerja tahun 2024 telah dijadikan dasar perencanaan tahun 2025. Laporan kemajuan IKPA bulanan Bendahara, budaya pemantauan yang aktif, dan tindak lanjut audit yang terorganisir adalah beberapa keunggulannya. Kekurangannya adalah tidak adanya sistem peringatan dini berbasis data, yang berarti pemantauan masih bersifat reaktif terhadap penurunan IKPA yang sudah terjadi. Disarankan untuk membuat sistem peringatan dini berdasarkan ambang indikator IKPA dan meningkatkan frekuensi koordinasi dengan KPPN menjadi sekali setiap dua minggu agar penurunan ini bisa terdeteksi dan ditangani lebih cepat.

Penelitian oleh Hartono & Puspitasari (2023) menemukan bahwa kualitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas keseluruhan SPIP dengan korelasi sebesar 0,68. Penelitian oleh Purbayati et al. (2023) mensurvei 214 kepala APIP di seluruh Indonesia dan mengungkapkan bahwa mayoritas (61,2%) APIP pemerintah daerah masih berada pada tingkat kapabilitas 2 (infrastructure), belum mencapai tingkat 3 (integrated) yang diperlukan untuk memberikan jaminan secara independen. BPS Kota Tomohon telah melakukan reviu IKPA bulanan dan tindak lanjut temuan audit secara terstruktur melalui aplikasi SPIDER, namun ketiadaan sistem peringatan dini berbasis data menunjukkan bahwa pemantauan masih bersifat reaktif, sejalan dengan temuan Purbayati bahwa kapabilitas pemantauan di instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan ke level yang lebih matang.

Secara umum, pelaksanaan sistem pengendalian internal BPS Kota Tomohon dinilai sebagai "cukup tetapi perlu penguatan." Dari lima komponen COSO yang dianalisis, aktivitas pengendalian memiliki pelaksanaan terbaik karena prosedur verifikasi berlapis dan pembagian tugas yang jelas. Di sisi lain, karena kesenjangan data antara unit teknis dan keuangan secara langsung berkontribusi pada penurunan IKPA, informasi dan komunikasi adalah komponen yang membutuhkan perhatian terbesar.

Penurunan nilai IKPA dari 97,13 menjadi 93,20 adalah hasil dari akumulasi kekurangan pada berbagai komponen yang saling berinteraksi, bukan hanya karena kelemahan satu komponen kontrol. Keterlambatan data teknis (defisit dalam informasi dan komunikasi), reaksi yang lamban terhadap ancaman dinamis (kelemahan dalam penilaian risiko), dan ketergantungan pada pemantauan manual (kelemahan dalam kegiatan pengendalian dan pemantauan) semuanya berkontribusi pada kondisi yang rentan terhadap penurunan kinerja.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) di BPS Kota Tomohon, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPI telah berjalan cukup baik dalam mendukung pengelolaan anggaran dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Pada aspek lingkungan pengendalian, pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan disiplin anggaran,

terutama setelah terjadinya penurunan nilai IKPA tahun 2024. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat evaluasi rutin setiap bulan serta penerbitan disposisi tertulis sebagai bentuk pengawasan dan tindak lanjut. Selain itu, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas dan terstruktur, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan berbagai peraturan Menteri Keuangan.

Pada aspek penilaian risiko, penelitian menemukan bahwa deviasi RPD pada kegiatan survei yang bersifat dinamis serta keterlambatan penyampaian dokumen penagihan dari penanggung jawab kegiatan teknis menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan nilai IKPA. Dalam aspek kegiatan pengendalian, BPS Kota Tomohon telah menerapkan prosedur pengendalian yang cukup baik melalui mekanisme bertingkat dalam pengajuan faktur honorarium mitra dan penerapan pemisahan tugas antara pelaksana teknis dengan bagian keuangan, khususnya dalam proses input data pencapaian output dan penyelesaian anggaran.

Selanjutnya, pada aspek informasi dan komunikasi, koordinasi penyusunan RPD dilakukan melalui mekanisme komunikasi dari bawah ke atas. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan masih belum optimal karena penggunaan aplikasi Back Office Selindo (BOS) terkendala keterbatasan akses dashboard, sehingga pimpinan atau KPA masih mengandalkan laporan manual mingguan untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran. Pada aspek pemantauan, evaluasi terhadap nilai IKPA dilakukan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi OMS PAN guna mendeteksi lebih dini adanya penurunan skor. Selain itu, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya juga dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan anggaran dan rencana survei yang lebih realistis pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, penerapan Sistem Pengendalian Internal di BPS Kota Tomohon telah mendukung pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan akuntabel, meskipun optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi teknis masih perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. (2020-2024). *Data Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS Kota Tomohon Tahun 2020-2024*. Tomohon: BPS Kota Tomohon.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2023). *Menguji Konsistensi Melalui Angka Deviasi*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/larantuka>
- Hartono, B., & Puspitasari, E. (2023). Kapabilitas APIP dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah: Bukti empiris dari 82 kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 28-47. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1245>
- Kantohe, M. S. S., & Sumual, F. M. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good University Governance. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.57>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (t.t.). *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Kusuma, H., & Handayani, D. R. (2022). Dampak integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas pengendalian internal: Studi pada 38 pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 178-196. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.10>

- Leke, A. A. C. M., Irawati, R. I., & Candradewini, C. (2022). Analisis lingkungan pengendalian dalam pelaksanaan SPIP di Inspektorat Kabupaten Nagekeo. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 136-146. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.540>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pujiastuti, E., & Anwar, C. (2022). Integrasi COSO framework dan Fraud Pentagon Theory dalam pencegahan kecurangan pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 133-150. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art5>
- Purbayati, R., Wahyuni, S., & Mulyono, T. (2023). Kapabilitas APIP pemerintah daerah di Indonesia: Kondisi terkini dan tantangan ke depan. *Jurnal Pengawasan*, 15(1), 45-63.
- Radjak, F., Sendouw, R. H. E., & Siwij, D. S. R. (2025). Pengaruh Koordinasi Dan Pembagian Beban Kerja Terhadap Kinerja Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 2508-2517. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.10383>
- riyanto, D., Sari, M. M. R., & Dwirandra, A. A. N. B. (2022). Evaluasi penerapan komponen penilaian risiko dalam kerangka SPIP pada instansi vertikal pemerintah pusat. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 45-62.
- Rohmah, N., & Sulistyowati, Y. (2022). E-government dan efektivitas aktivitas pengendalian: Perspektif COSO framework. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(2), 245-260. DOI: <https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i2.456>
- Setiyaviani, S. P. A., & Julian, L. (2023). Evaluasi lingkungan pengendalian dengan kerangka pengendalian internal COSO di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3350-3364. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1674>
- Suhendra, M., & Komarudin, A. (2021). Kualitas sistem informasi manajemen dan opini audit laporan keuangan kementerian/lembaga: Bukti dari 34 K/L di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 7(1), 55-74.
- Wulandari, E., & Fachrurazi. (2023). Klasifikasi dan optimalisasi aktivitas pengendalian preventif dan detektif pada organisasi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.8921>